

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suriah adalah salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang sering mengalami konflik. Puncak ketidakstabilan yang terjadi di Suriah dimulai semenjak tahun-tahun setelah kemerdekaan negara Suriah pada tahun 1946. Hal itu dikarenakan adanya kudeta Partai Ba'ath di tahun 1946. Di tahun 1948, Suriah dan negara Arab lainnya berkonflik dengan menyerang Israel yang tidak setuju atas kemerdekaan Israel di Tanah Palestina, dikenal dengan Perang Arab-Israel. Tetapi negara-negara Arab kalah dari perang ini, karena adanya intervensi Amerika Serikat, yang berpihak kepada Israel.

Walaupun Amerika Serikat membantu Israel dalam perang Arab yang di dalamnya termasuk negara Suriah, Amerika Serikat adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan negara Suriah. Sebelum Amerika Serikat membantu Israel untuk mengokupasi sebagian dari daerah Suriah, Amerika Serikat telah menjalin hubungan dengan Suriah dimulai tahun 1835 hingga 1946.

Pada tanggal 7 Mei 1830 adalah awal mula hubungan Amerika Serikat dengan Suriah, dimana Amerika Serikat menandatangani perjanjian perdagangan dan navigasi dengan Kekaisaran Ottoman (Relation, 2013). Kemudian di tahun 1835 Amerika Serikat menunjuk konsul Amerika Serikat untuk Aleppo, Suriah yang pada saat itu masih menjadi bagian dari Kekaisaran Otoman (Relation, 2013).

Namun, hubungan Amerika Serikat dengan Suriah merenggang di tahun 1957. Upaya kudeta *Central Intelligence Agency* (CIA) untuk menjatuhkan Presiden Suriah yaitu Shukri al-Quwatli gagal. Suriah mengusir Duta Besar Amerika Serikat dari Damaskus. Setelah terjadi

Perang Enam Hari yaitu perang antara Israel dan Arab, hubungan kedua negara terputus di tahun 1967. Penyebabnya adalah Amerika Serikat lebih berpihak pada Israel dalam perang tersebut yang mengakibatkan Israel menang dan mengokupasi Dataran Tinggi Golan yang merupakan bagian dari negara Suriah. Suriah ingin merebutnya kembali. Tetapi Israel dibantu Amerika Serikat dari segi militer, dan kekalahan adalah kemungkinan terbesarnya. Kemudian diadakan pembicaraan damai antara kedua negara tersebut khususnya Suriah dan Amerika Serikat yang memimpin di periode 2002-2008 (Gurtler, Haimann, & Simmons, 2010).

Setelah terputus hubungan di tahun 1967, Amerika Serikat dengan Suriah kembali menjalin hubungan pada tahun 1974 setelah perang Yom Kippur. Sebelumnya Amerika Serikat masih berada dipihak Israel pada saat perang itu terjadi. Keterlibatan Amerika Serikat dalam perang tersebut menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan. Negara-negara Arab penghasil minyak yang tergabung dalam *Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC), memberlakukan embargo kepada Amerika Serikat. Hal itu menyebabkan kenaikan harga minyak dunia, yang berimbas pada turunnya perekonomian Amerika Serikat, dan membuat Amerika Serikat ragu untuk terlibat dengan Israel di perang Yom Kippur. Amerika Serikat memutuskan untuk berupaya menjadi perantara kesepakatan damai antara Israel dan Suriah, melalui diplomatik ke beberapa negara yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Henry Kissinger. Dari upaya tersebut, Israel menyetujui kesepakatan untuk melepas wilayah Suriah yang dianeksasi pada tanggal 28 Mei 1974, yang kemudian kesepakatan ini ditandatangani di Jenewa pada 5 Juni 1974 yang menjadi alasan berakhirnya Perang Yom Kippur (Muawal, 2017). Hubungan antara Amerika Serikat dengan Suriah pun berlanjut di tahun 1990-2000 untuk bergabung dalam

koalisi melawa rezim Irak Era Saddam Husein dan juga dalam negosiasi perdamaian di Timur Tengah dengan melibatkan Presiden Suriah, Hafez al-Assad.

Pasca serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, Suriah melakukan kerjasama untuk melawan teror dengan Amerika Serikat. Kerjasama tersebut berfokus untuk melawan Al-Qaeda. Ketika Amerika Serikat melakukan invasi ke Irak dan juga melakukan intervensi ke negara-negara di Timur Tengah, Suriah tidak mendukungnya.

Keinginan Amerika Serikat untuk memperbaiki hubungan dengan Suriah dapat dilihat ketika masa kepemimpinan Barack Obama, namun gagal karena terjadinya perang sipil di Suriah. Di perang sipil Suriah tersebut, Amerika Serikat melakukan intervensi dan menyatakan agar presiden Suriah Bashar al-Assad harus mundur dari kepemimpinannya (Hersh, 2011). Dorongan Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan PBB adalah agar Dewan Keamanan PBB membuat resolusi yang mengecam tindakan pemerintah Suriah untuk menekan pemberontakan warga sipil di Suriah (Horn, 2011). Desember 2012, Amerika Serikat mengakui koalisi oposisi Suriah yang dibentuk untuk menggulingkan Presiden Bashar al-Assad (Dwyer & Hughes, 2012).

Amerika Serikat pada periode 2013-2018 menerapkan beberapa kebijakan untuk mengintervensi konflik di Suriah. Sebagai contoh pada tahun 2013 Amerika Serikat melakukan intervensi konflik sipil Suriah melalui program CIA yang melatih dan melengkapi hampir 10.000 pejuang yang dikirim ke Suriah untuk melakukan pemberontakan, berusaha untuk menggulingkan kepemimpinan Bashar al-Ashad, yang mana CIA mewakili keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam perang saudara Suriah (Miller & DeYoung, Secret CIA Effort in Syria Faces Large Funding Cut, 2015). Pada tahun 2018, pemerintah Amerika Serikat Donald Trump menarik 2000-2500 tentara yang berada di

Suriyah untuk kembali ke Amerika Serikat (Jazeera & Agencies, 2018). Intervensi Amerika Serikat terhadap konflik Suriyah periode 2013-2018 menyebabkan konflik Suriyah semakin rumit. Lalu kebijakan seperti apa yang Amerika Serikat putuskan dalam melakukan intervensi tersebut dan mengapa Amerika Serikat memilih kebijakan tersebut merupakan permasalahan yang menarik untuk diteliti.

Periode 2013-2018 dipilih, dimulai saat adanya perang saudara di Suriyah dimana Amerika Serikat terlibat di dalamnya. Penelitian ini dimulai pada tahun 2013 karena Amerika Serikat mendominasi peran pihak Barat dalam konflik Suriyah. Penelitian ini mengambil periode kontemporer yang menangani konflik domestik Suriyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik pertanyaan penelitian, yaitu ***Mengapa Pemerintah Amerika Serikat Melakukan Intervensi dalam Konflik Suriyah?***

C. Kerangka Berpikir

Untuk membantu menganalisis intervensi pemerintah Amerika Serikat dalam konflik Suriyah periode 2013-2018, digunakan Teori Kebijakan Luar Negeri dan Konsep Kepentingan Nasional.

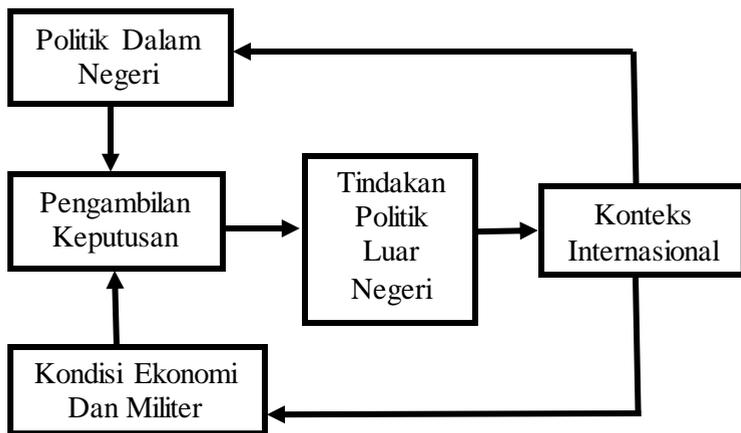
1. Teori Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan bentuk upaya negara untuk mencapai tujuan Kebijakan luar negeri memiliki beberapa faktor. Faktor tersebut yang mempengaruhi suatu negara untuk membuat kesepakatan. Untuk menjelaskan kebijakan proses pengambilan keputusan Amerika Serikat dalam mengintervensi konflik Suriyah, penulis ingin menggunakan

proses pengambilan keputusan teori oleh William D. Coplin.

Menurut Coplin, kebijakan luar negeri merupakan suatu keputusan yang didahului oleh sebuah mekanisme politik dimana tuntutan dari politik dalam negeri, kemampuan dari kekuatan ekonomi dan militer negara. Untuk mempermudah pemahaman mengenai teori ini, William D. Coplin menjelaskan melalui gambar berikut ini (Coplin, Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaahan Teoritis, 2003):

**Gambar I. C.1 Proses Pengambilan Keputusan
William D. Coplin**



Sumber : William D.Couplin, Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaahan Teoritis, (Bandung : CV. Sinar Baru, 1992), hal. 30.

Dari pernyataan Coplin di atas, ada 3 faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri , yaitu kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer dan konteks

internasional. Ketiga faktor ini dapat menjelaskan alasan ditetapkan politik luar negeri suatu negara.

1. Politik Dalam Negeri

Coplin memfokuskan analisisnya pada hubungan antar para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor dalam negeri, yang berupaya mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka. Coplin memberikan istilah *policy influencers* bagi yang mempengaruhi kebijakan atau pengambil keputusan. Ada 4 tipe *policy influencers* menurut pandangan Coplin, di antaranya : *bureaucratic influencer* (Birokrat yang mempengaruhi), *partisan influencer* (partai yang mempengaruhi), *interest influencer* (kepentingan yang mempengaruhi), dan *mass influencer* (massa yang mempengaruhi) (Coplin, Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaahan Teoritis, 2003).

Amerika Serikat dalam melakukan intervensi perang saudara di Suriah secara langsung di mulai tahun 2013 dibawah kepemimpinan Presiden Barack Obama. Dalam tindakan intervensi ini, *Barack Obama* berusaha meyakinkan kongres untuk menyelesaikan konflik sipil di Suriah dengan cara membantu para kaum oposisi rezim Bashar al-Ashaad dan juga rakyat Suriah. Kebijakan itu diambil karena sejak 1973 (Perang Yom Kippur), kepentingan utama Amerika Serikat ialah untuk menjaga kestabilan kawasan Timur Tengah. Hal itu didasarkan pada kepentingan ekonomi Amerika Serikat yang pada saat itu menurun akibat adanya embargo minyak dari negara-negara penghasil minyak Arab ketika perang Yom Kippur terjadi.

Dalam intervesinya terhadap perang saudara di Suriah, Obama berusaha mencerminkan sikap yang baik agar menjadi aspirasi rakyatnya dan masyarakat dimanapun memiliki hak memilih pemimpin tanpa ada

rasa takut. Hal ini selaras dengan keinginan masyarakat di Suriah yang menginginkan Bashar al-Ashaad mundur dari jabatannya sebagai presiden Suriah.

HAM memegang peranan penting pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk melakukan intervensi dalam konflik Suriah. Amerika Serikat menganggap penggunaan senjata kimia dalam peperangan yang dilakukan oleh Rezim Bashar al-Assad terhadap rakyatnya sendiri adalah tindakan yang melanggar HAM dilihat dari jumlah korban, yakni sejumlah 1.297 orang meninggal dan 1.692 orang korban tidak fatal. Namun, mayoritas masyarakat Amerika Serikat tidak setuju apabila pemerintah melakukan intervensi tersebut dan menganggap hanya memperumit konflik. Akan tetapi pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa intervensinya di Suriah merupakan kebijakan yang telah diperhitungkan dengan baik.

2. Kondisi Ekonomi dan Militer

Pengambil keputusan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan militer dalam membuat kebijakan luar negeri mereka. Pengambil keputusan harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer, serta kelemahan negaranya ketika ia menyusun politik luar negeri. Pengambil keputusan harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya, yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer (Coplín, Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaahan Teoritis, 2003).

Adanya perang saudara di Suriah, pemerintah Amerika Serikat mengerahkan kebijakan dengan membantu pihak oposisi Suriah, dengan melakukan serangan militer terbatas ke Suriah karena banyaknya warga sipil yang tewas akibat penggunaan senjata kimia. Ini alasan mengapa Amerika Serikat masuk untuk

mengintervensi perang saudara di Suriah. Amerika Serikat menganggap bahwa penggunaan senjata ini merupakan pelanggaran HAM. Amerika Serikat juga memberi dukungan dan bantuan senjata melalui oposisi *Free Syrian Army*.

Tidak hanya bantuan militer yang di berikan oleh Amerika Serikat, namun juga memberikan pasokan pangan dan obat serta bantuan dana sebesar \$60 juta yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry, guna membantu kubu oposisi untuk memperluas stabilitas, membangun pemerintah dan penegakan hukum (BBC, Bantuan AS untuk Oposisi Suriah Ditingkatkan, 2013). Amerika Serikat berhasil mengumpulkan dana sebesar \$260 juta hasil dari kerjasamanya dengan Organisasi Interasional, untuk membantu pihak oposisi dalam memenuhi kebutuhan dan membantu transisi Suriah menjadi negara Demokratis, termasuk \$15 juta yang ditujukan untuk *Syria Recovery Trust-fund* yang akan digunakan untuk pemulihan Suriah pasca perang. Pada 27 September 2016, Amerika Serikat akan menambah bantuan sebesar \$364 juta, jika ditotal dari 2011 pemerintah mengerahkan sebesar \$6 miliar berupa penanganan darurat termasuk dalam penyediaan cadangan makanan, obat-obatan, air minum bersih dan bantuan lainnya bagi masyarakat Suriah yang terkena dampak dari perang (USAID, 2013).

3. Konteks Internasional

Menurut Coplin dalam teorinya, kondisi internasional menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas politik luar negeri suatu negara. Terdapat tiga elemen utama kondisi internasional yang mempengaruhi penyusunan politik luar negeri tersebut yaitu, kondisi geografis, ekonomi dan politik di pusanan politik internasional (Coplin, Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaahan Teoritis, 2003).

Dalam konteks internasional, Amerika Serikat sangat mendukung perlawanan oposisi dari rezim Bashar al-Ashaad. Hal ini supaya pemerintahan yang demokratis di Suriah terwujud. Negara sekutu Amerika Serikat seperti Inggris, Perancis, Arab Saudi dan Turki juga ikut mendukungnya. Namun, Rusia dan Iran berada di pihak rezim Bashar al-Ashaad, hingga memiliki markas militer di Suriah untuk persiapan apabila ada serangan yang ditujukan untuk Suriah yang berasal dari Amerika Serikat beserta sekutunya.

Adanya 2 negara adidaya yang berpengaruh di Timur Tengah khususnya pada konflik di Suriah, menambah situasi Suriah semakin rumit. Amerika Serikat melibatkan diri di Suriah dengan alasan terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Bashar al-Ashaad. Mayoritas masyarakat Suriah ingin berdemokrasi, namun tidak dengan rezim Bashar al-Ashaad dimana Rusia dan Iran hadir untuk mendukungnya.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Dalam kepentingan nasional, aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional adalah negara, yang peranannya tersebut berpengaruh bagi masyarakat di dalam negerinya. Adanya kebutuhan suatu negara merupakan faktor terciptanya kepentingan nasional. Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional merupakan kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik (Coulumbis & Walfe, 1990).

Dalam buku yang di tulis oleh Mochtar Mas'oe'd, menerangkan bahwa konsep kepentingan nasional ini sama dengan menjalankan kelangsungan hidup. Yang dimaksudkan

adalah kelangsungan hidup itu ada karena adanya kemampuan minimum yang mana dilihat dari kepentingan suatu negara yang dihubungkan dengan negara lain. Aspek-aspek yang menjadi identitas suatu negara merupakan gambaran yang diberikan oleh adanya kepentingan nasional, yang memiliki kegunaan-kegunaan. Hal ini dalam penjelasan kepentingan nasional itu sendiri digambarkan oleh penjabaran James N. Rosenau yang mana kegunaan pertama, sebagai istilah analitis untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri dan berikutnya yaitu sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai sarana guna mengancam, membenarkan, ataupun mengusulkan suatu kebijakan (Mas'ood, 1994).

Dalam analisis kepentingan nasional, peran aktor dalam hal ini negara, akan mengejar apapun yang dapat membentuk dan mempertahankan, pengendalian suatu negara atas negara lain. Pengendalian tersebut berhubungan dengan kekuasaan yang tercipta melalui teknik-teknik paksaan ataupun kerjasama (Jemadu, 2008), tergantung dari seberapa besar 'power' yang negara tersebut miliki.

Kepentingan Amerika Serikat dalam intervensinya terhadap Suriah, masuk ke dalam kepentingannya terhadap Timur Tengah. Kepentingan tersebut meliputi bidang ekonomi yaitu untuk mempertahankan suplai minyak dari kawasan Timur Tengah dan mencegah munculnya kekuatan ideologi Islam di kawasan tersebut. Amerika Serikat mencemaskan berdirinya *Islamic state* (negara Islam) di Suriah. Munculnya negara Islam baru dalam bentuk khilafah di Suriah bukan hanya akan mengancam keberadaan entitas Zionis Israel yang berbatasan dengan Suriah, namun juga mengancam negara-negara sekutunya di kawasan Timur Tengah. Jatuhnya rezim-rezim monarki Arab yang selama ini menjadi penjamin bagi akses Amerika Serikat untuk sumber minyak di kawasan tersebut dan mengancam kepentingan pasokan minyak untuk Amerika Serikat. Hal berpengaruh besar terhadap kekuatan ekonomi Amerika dan mengubah konstelasi internasional yang selama ini masih di bawah dominasi Amerika (Ruslan, 2013).

Amerika Serikat dalam mencegah munculnya ideologi Islam (khilafah) di Suriah mempunyai kepentingan agar ideologinya, yaitu liberalisme dapat tersebarluaskan. Secara tidak langsung Amerika Serikat mempromosikan demokrasi apabila melakukan kebijakan intervensi. Hal itu dapat dilihat ketika Amerika Serikat secara langsung mendukung oposisi Suriah untuk terus melawan rezim Bashar al-Ashaad. Bantuan dana dari Amerika Serikat untuk menyuplai keberlangsungan hidup korban dikerahkan untuk rakyat Suriah yang ingin berdemokrasi.

D. Hipotesa

Berdasarkan dari penjabaran permasalahan di atas maka penulis merumuskan bahwa Amerika Serikat melakukan intervensi terhadap konflik di Suriah dikarenakan:

1. Amerika Serikat ingin menyebarluaskan pengaruh ideologinya di Suriah.
2. Dengan kebijakan tersebut, Amerika Serikat ingin melindungi kepentingan ekonominya.

E. Tujuan

1. Untuk mengetahui alasan-alasan apa saja yang mempengaruhi Amerika Serikat mengambil kebijakan luar negeri yaitu dalam hal intervensi terhadap konflik Suriah.
2. Menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesa yang diajukan penulis.
3. Menerapkan teori dan konsep yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan di jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu Hubungan Internasional Fakultas

F. Jangkauan Penelitian

Berdasarkan alokasi waktunya, penulisan skripsi ini dibatasi, mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2018 agar kepenulisan skripsi ini tidak terlalu melebar. Tidak menutup kemungkinan bahwa penulis akan menggunakan data diluar jangkauan penelitian, namun ini hanya sebagai referensi atau catatan saja.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Djarm'an Satori mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya (Komariah & Satori, 2011).

Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sukmadinata, 2011).

Tahap-tahap yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yang pertama menetapkan penelitannya berfokus

dengan menggunakan logika induktif. Dalam skripsi ini fokusnya pada intervensi Amerika Serikat dalam konflik Suriah periode 2013-2018. Kedua, menentukan setting dan subjek penelitian yaitu konflik Suriah periode 2013-2018. Dan ketiga adalah melakukan pengolahan dan analisis data (Bagong & Sutinah, 2007). Penelitian ini mengelaborasi latar belakang hubungan AS dengan Suriah, awal mula Amerika Serikat mengintervensi perang/konflik sipil Suriah dan kebijakan apa yang diambil Amerika Serikat dalam melakukan intervensi tersebut. Kemudian menganalisa dengan kerangka pemikiran teori kebijakan luar negeri, dan kepentingan nasional. Tahap penyajian data yaitu penelitian disajikan dalam bentuk kata-kata untuk membagi pemahaman peneliti mengenai penelitiannya kepada orang lain (Bagong & Sutinah, 2007).

H. Sistematika Penulisan

Dalam karya tulis ini, penulis membagi ke dalam beberapa bab guna untuk mempermudah penyusunan bahasan dan analisis-analisis. Sistematika penulisan yang akan dijabarkan dalam karya tulis ini terdapat 5 bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisi pendahuluan, diantaranya mengemukakan paparan singkat mengenai latar belakang intervensi Amerika Serikat dalam konflik Suriah, rumusan masalah, landasan teoritik, hipotesa, tujuan penelitian, batasan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang konflik yang terjadi di Suriah yang meliputi gambaran umum konflik Suriah serta keterlibatan negara-negara *super power* dalam konflik Suriah.

BAB III : Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah

Amerika Serikat dalam Konflik Suriah, yang meliputi kebijakan luar negeri dalam konflik Suriah masa presiden Barack Obama dan kebijakan luar negeri dalam konflik Suriah masa presiden Donald Trump.

BAB IV : Dalam bab ini, penulis akan memaparkan berbagai alasan mengapa Alasan Amerika Serikat melakukan intervensi konflik Suriah, yang meliputi Amerika Serikat ingin menyebarluaskan pengaruh ideologinya di Suriah serta dengan kebijakan tersebut, Amerika Serikat ingin melindungi kepentingan ekonominya.

BAB V : Dalam bab ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang telah ditulis dari bab-bab sebelumnya, terutama dalam merangkum analisis yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan penulis.